

PENGAWASAN PETUGAS PERTAMANAN DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTAMANAN KABUPATEN SUMEDANG

Dadan Setia Nugraha

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Sebelas April Sumedang

E-mail: dadan.setianugraha@gmail.com

ABSTRACT. *This study aims to analyze the problems of supervision in the Sumedang Regency Department of Environment and Forestry Department, inhibiting factors in conducting surveillance, as well as efforts to overcome obstacles in conducting supervision in the Sumedang District Department of Environment and Forestry Department. The method used in the preparation of this research report is a qualitative research method (Naturalistic Setting) with descriptive type. The sampling technique used is purposive sampling. With research informants: Head of Waste and Parks Management Division, Head of RTH Maintenance Section, Parks and Cemeteries, Staff I Section RTH Maintenance, Parks and Cemeteries, and Staff II RTH Maintenance Section, Parks and Cemeteries. Data collection techniques through secondary data collection techniques such as library studies and documentation. In analyzing the data used the Miles and Huberman models with the steps: Data reduction, Data presentation, Conclusion Drawing / Verification, and Triangulation. Based on the research, it is found that in conducting supervision, determining standards is important because it is a guideline in measuring the level of effectiveness. The absence of guidelines clearly becomes an obstacle in the implementation of an activity, especially regarding activities within a government agency. There is an effort to minimize the absence of reference standards, namely by persuasive approaches to employees.*

Keywords: Management, Supervision and Landscape

PENDAHULUAN

Penataan kota tentu dibutuhkan perencanaan-perencanaan yang matang dalam penataannya sehingga tidak terlihat semberawut dan kumuh, jalan-jalan rapi dengan dihiasi tanaman-tanaman yang indah dan terawat, pedagang-pedagang ditertibkan penempatannya agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas, bangunan-bangunanpun dibangun sesuai dengan perijinannya dalam arti tidak ada bangunan liar yang akan mengganggu keindahan kota, serta ditatanya saluran-saluran air agar tidak terjadi banjir pada saat musim hujan.

Tidak hanya itu, untuk memperindah tata kota salah satunya adalah pertamanan, pertamanan merupakan kegiatan mengolah

dan menata lahan dengan menumbuhkan berbagai tanaman seraya memperhatikan segi keindahan (estetika). Dalam pengertian di Indonesia, pertamanan banyak terkait dengan penataan ruang menggunakan berbagai elemen alami, terutama tanaman. Elemen lainnya adalah patung, air, kolam, serta hewan. Suatu taman dapat pula dibuat untuk menghasilkan sesuatu, seperti sayuran, buah, serta sumber pengobatan, atau untuk memelihara koleksi tanaman. Taman yang demikian dapat disebut pula sebagai kebun yang di dalamnya terdapat berbagai tanaman.

Pertamanan untuk masing-masing kota atau kabupaten dipegang langsung oleh Pemerintah Daerah, yakni dari mulai pembuatan hingga perawatannya. Manfaat

pertamanan di Kabupaten Sumedang adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lingkungan yang indah, bersih dan nyaman. Selain dari pada itu, diharapkan dengan pertamanan yang rapih dan bersih serta tertata dengan baik, menjadi daya tarik bagi wisatawan, baik wisatawan manca negara ataupun wisatawan domestik.

Untuk memperindah kota Sumedang, dari mulai masuk perbatasan kota dibangun taman dan gapura, taman dan gapura tersebut selain untuk informasi batas kota, juga berfungsi untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan dengan keindahannya, dan fungsi lainnya adalah menjadi salah satu ciri khas atau *icon* bagi kota itu sendiri dengan tulisan-tulisannya seperti di perbatasan kota Jatinangor dan Tolengas Tomo yaitu *Wilujeng Sumping Di Kota Sumedang Puseur Budaya Sunda*.

Kemudian untuk mengingat sejarah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang membuat Taman Bino Kasih yang berlokasi di Bundaran Lama Polres Sumedang, semula bertujuan untuk mengurai kemacetan namun juga diharapkan untuk mengingat sejarah waktu dulu tentang Kota Sumedang, dan bukti sejarah lain yang diabadikan adalah Tugu Lingga Insun Medal Sumedang dan banyak lagi bukti-bukti sejarah yang diabadikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang yang ditata dan dikelola pertamanannya.

Selain dari pada itu, Kabupaten Sumedang terkenal dengan produk-produk unggulan salah satunya adalah tahu, maka sebagai cirri khasnya pula dibangun Tugu Tahu yang berlokasi di seputar Karapyak Sumedang Utara, dan tugu-tugu lainnya yakni Tugu Salak yang berlokasi di Legok

Kecamatan Paseh serta Tugu Batu yang dihiasi dengan hiasan buah gincu yang berada di Desa Tolengas Kecamatan Tomo.

Taman-taman lain yang berada di Kabupaten Sumedang adalah taman Bundaran Alam Sari yang berhiaskan air mancur dan tanaman, kemudian Taman Endog yang berada di tengah kota, serta Alun-alun Sumedang yang tepat berada di lingkungan Masjid Agung dan Musieum Pangeran Geusan Ulun Sumedang.

Dalam pelaksanaan penataan, pengelolaan dan pemeliharaan pertamanan di kabupaten Sumedang maka dibutuhkan pengawasan terhadap petugas pertamanan, yakni dengan tujuan agar terselenggaranya tugas dan fungsi dengan baik, berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sehingga pertamanan tetap terawat, bersih dan keindahannya tetap terjaga.

Dengan pengawasan yang intensif terhadap petugas pertamanan diharapkan terciptanya lingkungan yang bersih, sehat dan tetap indah serta terjaga kelestariannya, karena tanpa pengawasan yang intensif terhadap petugas pertamanan, maka keberadaan pertamanan di Kabupaten Sumedang tidak hanya rusak namun akan hilang.

Pengawasan petugas pertamanan yang dilaksanakan oleh DLHK adalah setiap hari sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, yakni dimulai dari Taman Batas Kota Jatinangor pada awal bulan, kemudian taman-taman yang lainnya hingga berakhir di Taman Batas Kota Tolengas kecamatan Tomo.

Pada setiap bidang atau pekerjaan tidak akan luput dari permasalahan baik intern ataupun ekstern begitupun dalam hal pengawasan petugas pertamanan di Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan hasil observasi awal ditemukan indikasi permasalahan pengawasan petugas pertamanan di DLHK Sumedang dengan indikasi sebagai berikut ;

1. Proses pengawasan Bidang Pertamanan yang belum optimal
2. Prosedur pengawasan Bidang Pertamanan yang belum terlaksana dengan baik.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk membatasi permasalahan yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengawasan Petugas Pertamanan di DLHK Kabupaten Sumedang ?
2. Faktor Penghambat Pengawasan Petugas Pertamanan di DLHK Kabupaten Sumedang ?
3. Upaya Mengatasi Penghambat Pengawasan Petugas Pertamanan di DLHK Kabupaten Sumedang ?

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengawasan Petugas Pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang mempengaruhi pengawasan petugas pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan pengawasan petugas pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kabupaten Sumedang.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Winardi (1998: 78) pengawasan adalah "Suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi,

untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan".

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), menyatakan bahwa pengawasan "Sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan".

Tujuan dari pengawasan Silalahi (2003:181) adalah sebagai berikut :

1. Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan.
2. Agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan.
3. Mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan, sedang atau mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya.
5. Mencegah penyalahgunaan otoritas dan kedudukan.

Untuk terselenggaranya pengawasan Pertamanan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang setidaknya ada beberapa proses pengawasan biasanya meliputi kegiatan yang harus di perhatikan, menurut Ranupandojo (1990 : 109), yaitu :

1. Menentukan ukuran
2. Mengadakan penilaian
3. Membandingkan antara pedoman pelaksanaan dengan penyimpangan
4. Mengadakan perbaikan

Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan proses pengawasan terhambat. Menurut Mulyadi (2007: 770), mengemukakan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan adalah:

1. Perubahan Organisasi
2. Kompleksitas organisasi memerlukan pengawasan formal karena adanya desentralisasi kekuasaan.
3. Kesalahan/penyimpangan yang dilakukan anggota organisasi memerlukan pengawasan.

Adapun cara mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pengawasan menurut Mulyadi (2007: 770) yaitu :

1. Mengantisipasi perubahan organisasi
Mengatasi perubahan organisasi yaitu dimana kita bisa menyeimbangkan perubahan organisasi dengan keadaan kita sehingga dapat mengurangi dampak dari perubahan organisasi tersebut.
2. Mengantisipasi kompleksitas organisasi
Mengantisipasi kompleksitas organisasi adalah suatu cara dimana terciptanya komunikasi yang dapat mengurangi tingkat diferensiasi yang ada di dalam sebuah organisasi.
3. Menghindari kesalahan / penyimpangan
Menghindari kesalahan / penyimpangan yaitu suatu usaha atau cara yang dilakukan seseorang atau kelompok dalam mengatasi hal-hal yang dapat merugikan sebuah organisasi.

METODE

Dalam penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (Natural Setting) dan hasil dari penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.

Objek dan informasi penelitian kualitatif menjelaskan objek penelitian yang menjadi fokus dan lokus penelitian ini adalah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebanyak 4 (empat) orang yang terdiri dari Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan, Kepala Seksi Pemeliharaan RTH, Pertamanan dan Pemakaman, dan Staf Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan.

Untuk menunjang metode yang digunakan guna memperoleh informasi dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 1) Studi Kepustakaan; dan 2) Studi Lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data yang terdiri dari: 1) Reduksi Data; 2) Penyajian Data; dan 3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi.

PEMBAHASAN

Pengawasan Petugas Pertamanan di DLHK Kabupaten Sumedang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen suatu organisasi. Dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu Pengawasan dikatakan

penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa fungsi ini berusaha untuk menjamin kegiatan organisasi bergerak ke arah tujuannya.

Dengan adanya pengawasan, dapat diketahui apakah pelaksanaan kegiatan berjalan sebagaimana semestinya atau terjadi kesalahan atau penyimpangan. Jika telah diketahui, tindakan lebih lanjut dapat dilaksanakan. Kemudian, dapat diusahakan untuk meningkatkannya dan jika terjadi kesalahan dapat dilakukan perbaikan.

Berdasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Sumedang belum mempunyai standar secara tertulis.
- b. Dalam beberapa hal bisa dilakukan secara lebih intensif lagi, terutama ketika sedang musim penghujan.
- c. Dalam hal perencanaan sangat terbentur dengan anggaran yang minim.
- d. Ukuran hasil kerja pada bidang pertamanan dilihat dari segi estetika.
- e. Evaluasi dilaksanakan tiap satu bulan satu kali.

Setelah melakukan kajian diatas, peneliti melihat ada ketimpangan antara keyataan dilapangan dengan pendapat para ahli yang dikemukakan oleh Handoko (1998:77), bahwa setidaknya dalam hal menentukan standar ada tiga standar, yaitu:

- a) Standar-standar fisik, meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah langganan, atau kualitas produk.

- b) Standar-standar moneter, yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup biaya tenaga kerja, biaya penjualan, laba kotor, pendapatan penjualan, dan sejenisnya.
- c) Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas waktu suatu pekerjaan harus diselesaikan.

Mengadakan penilaian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi, penilaian yang dilakukan harus secara sistematis untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Disamping itu, juga untuk menentukan kebutuhan pelatihan kerja secara tepat, memberikan tanggung jawab yang sesuai kepada karyawan sehingga dapat melaksanakan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang dan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan dalam hal promosi jabatan atau penentuan imbalan.

Secara lebih spesifik, tujuan dari evaluasi kerja sebagaimana dikemukakan Sunyoto (1999:1) yang dikutip oleh Mangkunegara (2005:10) adalah:

1. Meningkatkan Saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja.
2. Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.
3. Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap karier atau pekerjaan yang di embannya sekarang.
4. Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan, sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya.

Tingkat kepatuhan terhadap instruksi yang diberikan sangatlah penting. Karena memberikan instruksi merupakan kegiatan yang dilakukan pimpinan untuk menggerakkan, mengarahkan, membimbing, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Pengarahan ini dapat dilakukan secara persuasif atau bujukan dan instruksi, tergantung cara mana yang paling baik.

Terry (dalam Winardi, 2012: 327) menjelaskan bahwa pengarahan memiliki beberapa karakteristik diantaranya:

1. *Pervasive Function* yaitu pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Setiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya.
2. *Continous Activity* merupakan pengarahan aktivitas berkelanjutan disepanjang organisasi.
3. *Human Factor* adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak bisa diprediksi.
4. *Creativity Activity* fungsi pengarahan yang membantu dalam mengubah rencana ke dalam tindakan. Tanpa fungsi ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik menjadi tak berarti.
5. *Executive Function* fungsi pengarahan dilaksanakan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level sepanjang bekerja pada sebuah perusahaan, bawahan menerima instruksi hanya dari atasannya.

Melakukan evaluasi menjadi suatu hal yang wajib dilakukan karena evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu instansi dikarenakan dapat menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan suatu tugas. Memberikan solusi terhadap suatu masalah sangatlah penting karena hal tersebut memiliki tujuan

untuk membuat sebuah organisasi atau individu berjalan baik. Tahapan pemberian solusi menurut Polya (1973:5) yaitu :

- a. Memahami masalah
- b. Merencanakan pemecahan
- c. Melaksanakan rencana
- d. Memeriksa kembali

Faktor Penghambat Pengawasan Petugas Pertamanan di DLHK Kabupaten Sumedang

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah perubahan struktur organisasi, kompleksitas organisasi, dan kesalahan/penyimpangan.

Berdasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Perubahan struktur organisasi tidak ada karena pada dasarnya perubahan struktur organisasi tidak memberikan hambatan terhadap pengawasan bidang pertamanan.
- b. Perubahan teknologi sangatlah perlu dilakukan dengan keadaan anggaran bidang pertamanan yang minim dan seadanya hal tersebut menjadi kendala yang dihadapi.
- c. Tingkatan manajerial tidak memberikan pengaruh yang signifikan dikarenakan ruang lingkup bidang pertamanan yang kecil.
- d. Budaya organisasi tidak memberikan hambatan bagi proses pengawasan dan kinerja dikarenakan hal tersebut sudah menjadi bagian dari bidang pertamanan.
- e. Tingkat pemahaman pegawai menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pengawasan dan kinerja dengan

berbeda-beda pemahaman setiap individunya.

- f. Dalam pengelolaan Bidang Pertamanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum mempunyai standar kerja yang jelas.

Meskipun pada dasarnya perubahan struktur organisasi tidak memberi hambatan peneliti menyarankan agar memiliki upaya untuk mengatasi hambatan yang akan di hadapi selanjutnya. Namun, begitu pentingnya teknologi terutama dalam pengerjaan dilapangan bidang pertamanan dimana memerlukan peralatan sehingga mempermudah dan mempercepat proses pengerjaan hal ini diperkuat dengan pendapat Alisyahbana (1980:1) "Teknologi yaitu cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal sehinggaseakan-akan memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indra dan otak manusia".

Tingkat pemahaman menjadi faktor penghambat proses pengawasan dan kinerja hal tersebut diperkuat dengan pendapat ahli yaitu menurut Fadel (2009:195) "Pemahaman atas tupoksi yaitu dalam menjalankan tupoksi bawahan seharusnya terlebih dahulu paham tentang tugas pokok dan fungsi masing-masing serta mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain itu, standar kerja sangatlah penting. Menurut Puji (2014:35) fungsi standar kerja yaitu:

- a. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/unit kerja.
- b. Sebagai dasar hukum apabila terjadi penyimpangan.
- c. Mengathui dengan jelas hambatan-hambatan yang mudah dilacak.

- d. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja.

- e. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

Upaya Mengatasi Faktor Penghambat Pengawasan Petugas Pertamanan di DLHK Kabupaten Sumedang

Diperlukannya upaya-upaya yang dilakukan oleh DLHK dalam mengatasi faktor-faktor penghambat pengawasan petugas pertamanan.

Berdasarkan pada hasil wawancara, observasi dan dokumentasi diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Untuk upaya mengatasi perubahan struktur organisasi tidak ada karena pada dasarnya perubahan struktur organisasi tidak memberikan hambatan terhadap pengawasan bidang pertamanan.
- b. Tidak banyak upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan yang berasal dari teknologi dikarenakan anggaran yang minim.
- c. Membuat standar kerja yang jelas mengenai pertamanan agar dapat meningkatkan pemahaman petugas pertamanan akan tupoksi mereka.
- d. Menciptakan budaya organisasi yang sadar akan kepatuhan kerja.

Peningkatan teknologi sangatlah diperlukan terutama pada bidang pertamanan yang bergelut dilapangan terutama peralatan dan perlengkapan keamanan pegawai dilapangan maka dari pada itu sangatlah perlu upaya mengatasi perubahan teknologi dengan keadaan bidang pertamanan sekarang yang masih minim akan teknologi.

Memperbaiki budaya organisasi merupakan salah satu upaya dalam mengatasi hambatan budaya organisasi sehingga dapat meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh organisasi tersebut.

Selain itu, begitu pentingnya meningkatkan tingkat pemahaman pegawai dengan cara mengevaluasi atau membandingkan sesuatu dengan setandar yang sering disebut dengan metode Benchmark. Dengan tingkat pemahaman pegawai yang berbeda-beda menjadikan organisasi tidak luput dari kesalahan/ penyimpangan dengan hal tersebut sebuah organisasi diharuskan selalau melakukan perbaikan dengan tujuan supaya tidak terulang kembali kesalahan tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bidang Pertamanan belum berdasarkan pada standar tertulis, jadi hanya berdasarkan situasi dan kondisi dilapangan. Sehingga berakibat dalam pelaksanaan tugasnya menjadi kurang optimal dikarenakan tidak mempunyai pedoman.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam pengawasan petugas pertamanan diantaranya yaitu tidak adanya standar kerja yang dalam membuat taman dan kurangnya pemahaman petugas pertamanan terhadap pembuatan taman.
3. Diperlukan melakukan beberapa upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat pengawasan petugas pertamanan yaitu membuat standar kerja untuk pembuatan taman.

Adapun saran yang dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertamanan Kabupaten Sumedang, yaitu:

1. Suatu instansi diharapkan harus mempunyai standar pengawasan yang jelas dan tertulis, karena dengan menentukan standar yang jelas dapat diketahui tingkat keberhasilan ataupun kekurangan dalam pelaksanaan suatu kegiatan.
2. Penilaian terhadap karyawan harus dilaksanakan secara rutin, dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan karyawan tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. Perbaikan atas suatu kekurangan dalam organisasi harus dilakukan dengan harapan tidak melakukan kembali kesalahan diwaktu yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, 2010. *Auditing And Assurance Service An Integrated Approach*, Prentice Hall International, New Jersey.
- Agoes, Sukrisno. 2012. *Petunjuk Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik*, Salemba Empat, Jakarta.
- Bun Yamin Ramto, (1991) "*Pola Kebijakan dalam system pengelolaan kota*", prisma 5.
- Davis, Gordon B. 2011. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Bagian Satu, Jakarta : Penerbit PPM.
- Fatoni, Abdurahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. PT Rineka Cipta: Jakarta

- Fatoni, Abdurahmat. 2009. *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Pertama. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Handyaningrat, Soewarno. 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Hasibuan. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Handoko T. Hani. (2012). *Manajemen, Cetakan Kelima Belas*, Yogyakarta: BPFE.
- Iskandar, Jusman, 2012, *Metodologi Penelitian Administrasi* Puspaga Bandung.
- Iskandar Jusman, 2002. *Teori dan Isu Pembangunan*, . Bandung. Puspaga.
- Konrath, Lawsey, F. 2010, *Auditing Concept and Application, A risk Analysis Approach*, 5th Edition, West Publishing Company.
- Karni, Soejono. 2010. *Auditing Audit Khusus dan Audit Forensik dalam Praktik*, Edisi Pertama, FE UI, Jakarta. Kasim, 1993, *Pengukuran Efektivitas dalam organisasi*, Fakultas Universitas Indonesia Jakarta.
- Meleong, Lexy, J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mintorogo. 2000. *Pengantar Ilmu Administrasi*. Jakarta: STIA-LAN Press.
- Mulyadi. 2007. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ranupandojo, Heidjrachman. 2007. *Manajemen Persoalia*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjahmada.
- Sedarmayanti. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju.
- Silalahi, Ulbert. 2013. *Studi tentang Ilmu Administrasi, Konsep, Teori, dan Dimensi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Sugiyono. 2006. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 1983. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers
- Winardi. 1990. *Azas-Azas Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.